
LAYANAN POS DAN TELEGRAF KEDIRI (1830-1930)

THE POSTAL AND TELEGRAPH SERVICES IN KEDIRI (1830-1930)

Muhammad Asep Kurnaini

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jln. Mayor Sujadi No. 46, Plosokandang, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia
almadiyyin.asep@gmail.com

Nurul Baiti Rohmah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jln. Mayor Sujadi No. 46, Plosokandang, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia
nurulbaitirohmah@gmail.com

Diterima tanggal 19 Juni 2024

Disetujui tanggal 2 Juni 2025

ABSTRACT

In the establishment of communication and distribution in the Kediri Residency between 1830 and 1930, the post office served as the primary institution responsible for carrying out these functions. It was tasked with providing delivery services, including receiving, collecting, sorting, transmitting, and delivering letters and postal packages. The study aims to examine the role of the post office in administrative communication, economic connections, as well as disaster management, and socio-economic functions. It explores the origins of the post office, and the routes it utilized, and the development of its technology. This research adopts historical methods, including heuristics, verification, interpretation, and historiography. The findings reveal that the post office was established in the Kediri Residentie, alongside Madiun Residentie in 1830. The Kediri post office operated along the southern postal line of Java which was built twenty years after the construction of the Groote Postweg on the northern route of Java in 1809. By the end of 1859, Kediri had become one of 28 regions connected to the telegraph network.

Keywords: *existence, services, postal, communication, and Kediri.*

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan komunikasi dan distribusi di Residentie Kediri pada 1830-1930, kantor pos menjadi lembaga yang mewadahi penyelenggaraan tersebut. Kantor pos mengemban tugas sebagai lembaga yang menyediakan layanan pengiriman dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dalam menerima, mengumpulkan, menyortir, mentransmisikan, serta mengantar surat-surat dan paket pos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kantor pos dalam konteks komunikasi administratif, koneksi ekonomi,

serta penanganan bencana dan sosial ekonomi, yaitu dengan cara menggali keberadaan awal, jalur yang digunakan, dan melihat perkembangan teknologi dari kantor pos. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembangunan kantor pos di daerah Residentie Kediri bersamaan dengan daerah Residentie Madiun pada 1830. Jalur pos yang digunakan pos Kediri merupakan jalur pos selatan Jawa yang dibangun dua puluh tahun setelah pembangunan Jalan Raya Pos di jalur utara Jawa pada 1809. Selain itu, pada akhir 1859, Kediri menjadi salah satu daerah dari 28 daerah yang mendapat saluran telegraf.

Kata Kunci: eksistensi, jasa, pos, komunikasi, dan Kediri.

A. PENDAHULUAN

Kantor merupakan entitas organisasi yang mencakup lokasi fisik, personel, dan aktivitas administratif yang bertujuan untuk mendukung kepemimpinan suatu organisasi (Siagian 2021:42). Menurut *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, kantor pos dapat dipahami sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang mengelola layanan pos (seperti pengiriman surat, paket, dan barang), telegraf, dan telepon. Kantor pos tidak hanya berperan dalam kegiatan operasional, seperti pengiriman surat dan barang, tetapi juga memiliki struktur pengelolaan dan organisasi yang terus berkembang dan diperbarui seiring dengan perubahan dalam teknologi dan kebutuhan masyarakat (Nijhoff 1939:1538).

Kantor pos pertama pada masa Hindia Belanda berdiri pada 26 Agustus 1746 di Batavia atas inisiatif G.W. Baron van Imhoff selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Alasan pendirian kantor pos tersebut adalah untuk melindungi dokumen penduduk, khususnya untuk individu yang berhubungan dengan biro kantor di luar Jawa dan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan pulang-pergi dari

Belanda (Arsip Nasional Republik Indonesia 2018:1). Sejak saat itu, kantor pos lahir untuk melayani masyarakat. Empat tahun setelah didirikannya kantor pos di Batavia, kantor pos Semarang kemudian dibangun untuk meyakinkan komunikasi pos yang teratur dan mempercepat pengiriman antara pos Batavia dan Semarang. Jalur pengiriman pos yang digunakan untuk pengiriman dokumen maupun surat melewati daerah Cirebon, Pekalongan, dan Karawang (Yuhida 2011:52). Seiring meningkatnya kebutuhan jasa pengiriman, pada 1750 terdapat perluasan jaringan pos di kota-kota di Jawa Tengah yang menjalar hingga ke wilayah Jawa Timur.

Pada 1830, Kediri menjadi satu dari sekian daerah di Jawa Timur yang mempunyai kantor pos untuk melayani masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa sistem pos sudah menjangkau daerah-daerah yang lebih luas di Hindia Belanda. Kantor Pos menjadi semakin penting untuk mendukung perdagangan dan komunikasi antardaerah. Layanan pos di Kediri lebih digunakan untuk keperluan perdagangan dan komunikasi antarpedagang serta pemilik usaha di Kediri dan daerah-daerah lain di Jawa

Timur dan luar Jawa. Selain Kediri, kantor pos juga dibangun di beberapa lokasi lain, seperti: Surakarta, Salatiga, Madiun, Yogyakarta, Bandung, Ngawi, Bangkalan, dan Sumenep (Nisrina 2018:48).



Gambar 1. Kantor pos dan telegraf di Kediri.
Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/804275>.

Terdapat perbedaan dalam pencatatan tahun berdirinya kantor pos pertama di Kediri, yang seharusnya pada 1830. Buku Kumpulan Hukum dan Peraturan Hindia Belanda keluaran 1856, *Verzameling van Wetten, Besluiten, Bepalingen, Kennisgaven, enz* (Kumpulan Hukum, Keputusan, Peraturan, Pemberitahuan, dan lain-lain), menguatkan informasi tersebut dengan menyatakan bahwa pada “27 November 1830 akan didirikan suatu pos surat untuk daerah Madiun dan Kediri.” Dalam surat putusan Pemerintah Agung Hindia Belanda juga tertulis jalur pengiriman pos, seperti berikut.

Dari Surakarta dan Rembang, ke Madiun dan Kediri melintasi Ngawi, dua jam setelah tiba di tempat itu, dari pos umum Samarang. Dari Ngawi ke Kartoardjo, ibu kota Madiun, satu jam setelah pos Surakarta dan Rembang, keduanya akan tiba di Ngawi. Dari Kartoardjo, ke Kediri, dua jam setelah

kedatangan Ngawi. (Tollens 1856:349)

Surat putusan Pemerintah Agung Hindia Belanda pun dapat digunakan sebagai patokan awal pembangunan kantor pos di Kediri karena penjelasan yang terdapat dalam surat putusan ini sama dengan penjelasan yang dimuat dalam *Javashe Courant* (Anonim 1830).

Namun, salah satu arsip foto Post en telegraaf Kantoor te Kediri 1930 justru mencatat pendirian kantor pos pertama di Kediri adalah pada 1930. Dalam konteks ini, perlu ditekankan pula adanya perbedaan informasi tahun pendirian yang ditemukan pada buku dokumentasi mengenai bangunan Kantor Pos Kediri. Buku tersebut mengandung sebuah paragraf berserta ilustrasi yang menggambarkan pendirian Kantor Pos Kediri pada 1930 (Nawiyanto et al. 2022:436). Dari perspektif yang berbeda, pendirian Kantor Pos Kediri pada 1930 merupakan Kantor Pos Kediri setelah diterapkan prinsip otonomi daerah dalam pemerintahan Kolonial Belanda, yang dikenal dengan sebutan “Politik Etis”.

Ketertarikan terhadap beberapa persoalan yang melingkupi kondisi kegiatan kantor pos menjadi alasan pemilihan topik. Kegiatan-kegiatan tersebut berkenaan dengan pengiriman barang dan dokumen. Secara lebih khusus, penulis ingin menilik eksistensi kegiatan pos masa kolonial sepanjang 1830-1930.

Sebagai gambaran penelitian tentang Kantor Pos yang telah dilakukan selama ini, berikut disajikan tiga hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pembandingan baik dari segi fokus,

objek, maupun subjek penelitian, dengan tujuan agar penelitian ini dapat lebih terarah dan terfokus dalam merancang konsep serta arah penelitian. Penelitian terdahulu yang membahas tentang eksistensi kantor pos telah banyak dilakukan oleh kalangan akademisi.

Pertama, Suisiana Yuhida yang mengkaji peran layanan pos di kawasan Solo dengan penekanan pada kontribusi businya dalam bidang jasa kepada masyarakat. Literatur ini memberikan gambaran tentang perkembangan sejarah layanan pos di Hindia Belanda dan perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi (Yuhida 2011). Pada awalnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda membuat pengaturan-pengaturan anyar terkait tarif penggunaan pos untuk pengiriman surat dalam negeri antarkeresidenan. Kantor pos yang berada di Jalan Raya Pos sepanjang 1810-1832 mencakup beberapa lokasi penting. Kemudian, pada periode 1835 hingga 1845, sejumlah kantor pos tambahan didirikan di berbagai lokasi. Pada 1875, dimulai pembuatan laporan tahunan. Meskipun sederhana, laporan tersebut mengandung data statistik penting mengenai uang dan lalu lintas pos dan menjadi awal dari sistem informasi pos.

Kedua, Wardatul Nadia dan Siti Heidi Karmela yang menelusuri dinamika layanan pos di wilayah Jambi dalam konteks perkembangan komunikasi dan pelayanan publik selama periode Orde Baru. Literatur ini membahas dan merinci perkembangan sejarah pelayanan pos dan telekomunikasi di Indonesia, termasuk

perubahan nama dan struktur organisasi yang terjadi seiring waktu. Teknologi telegraf dan telepon yang pada awalnya masuk ke Hindia Belanda telah berhasil memperbarui sistem jasa pos. Pada 1906, sistem pos di Hindia Belanda mengalami perubahan dan menjadi Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) atau Posts Telegraaf-en Telefoon Dienst (Nadia dan Karmela 2020). Sebagaimana kajian literatur sebelumnya, tulisan ini akan menginvestigasi hubungan perubahan teknologi pos di Kediri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Ayu Ratnasari yang membahas perkembangan jaringan telepon di Surabaya dengan fokus pada transformasi infrastruktur komunikasi pada masa kolonial. Literatur ini menyatakan bahwa Surabaya saat itu berada di posisi kedua dalam hal jumlah pemakai telepon terbesar setelah Batavia. Data yang disediakan per 31 Desember 1913 menunjukkan bahwa Surabaya memiliki 2.380 saluran telepon, sementara Batavia menduduki posisi pertama dengan 3.252 saluran (Ratnasari 2013). Dalam upaya untuk mengelola layanan telepon dengan lebih efisien, pemerintah kolonial memutuskan untuk membagi pengelolaan telepon menjadi delapan daerah sementara. Bali, Lombok, Kediri, Besuki, Pasuruan, Surabaya, Madiun, dan Madura termasuk di dalam distrik ketiga dengan pusat pengelolaannya berlokasi di Surabaya. Hal ini mencerminkan perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Hindia Belanda pada periode ini, dengan fokus pada pengelolaan layanan telepon di berbagai daerah, yang salah satunya

adalah Kediri.

Perbedaan utama dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada kantor pos yang menjadi saksi perkembangan daerah Kediri. Kantor pos di Kediri pada periode 1830-1930 telah memainkan peran penting dalam menghubungkan daerah Kediri dengan daerah lain di Pulau Jawa. Penelitian ini akan memberikan penegasan terhadap penelitian Kantor Pos Kediri sebelumnya, yang memiliki gagasan berbeda terkait pembangunan awal kantor pos di Kediri. Sebagai bagian dari desentralisasi bentuk pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, Kantor Pos Kediri menjadi pusat penting dalam mendukung sektor industri ini. Penelitian ini juga akan menganalisis bencana alam banjir pada 1894 dan 1913 yang turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan aktivitas kantor pos era kolonialisme Belanda di Kediri yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Sepanjang 1830-1930, ketika Kediri berada di bawah kendali kolonial Belanda, terdapat sejumlah bencana alam yang memengaruhi operasi kantor pos di wilayah tersebut.

Batasan temporal penelitian diawali pada 1830, didasarkan pada sebuah surat putusan bahwa pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan dekrit terkait pembangunan kantor pos untuk daerah Kediri dan Madiun (Tollens 1856:349). Tahun 1854 menjadi titik dari pembangunan *postweg* atau jalan pos yang berada di rute selatan Jawa yang melintasi Yogyakarta, Surakarta dan Kediri (Raap 2015:171). Adapun batasan akhir penelitian ditetapkan pada 1930, dengan alasan tahun tersebut merupakan puncak keberlanjutan dan

relevansi dari pos ke layanan telegraf di Kediri. Pada 1930, layanan telegraf di Kediri mempunyai fungsi penting bagi pemerintah Hindia Belanda dan kehidupan masyarakat dalam penyebaran informasi penting, misalnya pengiriman informasi bencana alam banjir pada 1913 (Anonim 1913).

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran layanan pos Kediri masa kolonialisme Belanda? Kajian ini juga akan membahas tentang perkembangannya sebagai jalur utama perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang pendirian layanan pos Kediri, perkembangan jalan pos, dan peran layanan pos Kediri di masa kolonialisme Belanda.

B. METODE

Metode ialah suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu dalam sebuah sistematika yang runtut dan teratur (Heryati 2017:59). Metode diperlukan dalam penulisan sebuah penelitian agar dapat menerangkan sejumlah pengetahuan secara sistematis. Metode yang diterapkan untuk penelitian ini ialah metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo, ada empat tahapan metode yang perlu dilakukan, yakni: heuristik, kritik sumber/ verifikasi, interpretasi, dan historiografi, yang dijabarkan sebagai berikut.

Tahap pertama, heuristik atau upaya dalam mengumpulkan sumber data sejarah (Kuntowijoyo 2013:37). Berdasarkan bentuknya, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulisan. Dalam penelitian ini, sumber penelitian berasal dari studi pustaka atau penggunaan sumber tulisan sebagai

sumber primer dan sumber tambahan, seperti buku lama tentang Hukum dan Keputusan Hindia Belanda 1808-1856 (Tollens 1856), arsip *Post- en telegraafgids voor Nederlandsch-Indië* 1924 (Hootdbestuur van den post 1924), buku hukum *Verzameling van Reglementen, Keuren en Politiebepalingen voor de Residentie Soerabaja* (Albrecht dan Rusche 1889), surat kabar lama *Javasche Courant* (Anonim 1830), arsip foto Poort over de weg tussen Kediri en Minggiran (Leiden University Libraries 1907), artikel jurnal, dan buku-buku terkait.

Tahap kedua, kritik sumber atau tahap untuk mengkritisi sumber data yang akan dijadikan rujukan (Kuntowijoyo 2013:77). Menurut jenisnya, kritik sumber dibagi menjadi 2, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Tahap ini memiliki fungsi sebagai alat untuk menetapkan kredibilitas (kritik internal) dan keautentikan (kritik eksternal) sebuah sumber data sejarah. Kritik internal juga dapat ditujukan pada metodologi pengumpulan data dalam arsip Hukum dan Keputusan Hindia Belanda. Bagaimana data dikumpulkan, dipelihara, dan disajikan dalam arsip tersebut dapat memengaruhi validitas informasi. Misalnya, dalam menilai persamaan isi data terkait pendirian awal kantor pos di Kediri, dengan membandingkan antara arsip Hukum dan Keputusan Hindia Belanda 1808-1856 dan surat kabar lama tahun 1830. Perbedaan tahun dalam pencatatan sejarah adalah tantangan umum dalam penelitian sejarah. Seorang peneliti harus mempertimbangkan berbagai sumber

data, melakukan investigasi lebih lanjut, dan mengorelasikan informasi dari berbagai sumber untuk memahami sejarah dengan akurat. Oleh karena itu, dalam penelitian sejarah dibutuhkan validasi data yang merupakan uji kebenaran terhadap data yang didapat dari sampel penelitian (Sugiyono 2013:222).

Tahap ketiga, interpretasi yang berguna untuk menafsirkan sumber data sejarah (Kuntowijoyo 2013:78), atau menafsirkan fakta-fakta sejarah yang didapat dari tahap kritik sumber. Dalam metode penelitian sejarah, tahap interpretasi terdiri atas dua bagian, yakni analisis (penguraian data) dan sintesis (menyatukan data). Interpretasi analisis melibatkan pemecahan informasi atau data menjadi komponen-komponen lebih kecil atau elemen-elemen yang dapat dipahami dengan lebih baik. Adapun interpretasi sintesis adalah penyatuan atau penggabungan elemen-elemen yang telah dianalisis menjadi suatu kesatuan baru atau konsep yang lebih besar. Proses interpretasi sintesis mencakup integrasi, pengelompokan, dan konstruksi. Contoh pengelompokan data, misalnya buku hukum *Verzameling van Wetten, Besluiten, Bepalingen, Kennisgaven, enz* yang memberikan informasi pembangunan kantor pos di Kediri pada 1830. Arsip ini didukung surat kabar lama *Javasche Courant* yang membahas mengenai surat putusan pembangunan kantor pos di Kediri yang bersamaan dengan pembangunan kantor pos di delapan kota lain. Buku hukum *Verzameling van Reglementen, Keuren en Politiebepalingen voor de Residentie Soerabaja* menjelaskan jalan pos atau

postweg Kediri sebagai garis khayal atau garis imajiner di daerah Jombang selaku Distrik Mojokerto. Buku ini dikelompokkan dengan arsip foto Poort over de weg tussen Kediri en Minggiran yang menggambarkan foto gapura kota di Jalan Pos Kediri daerah Minggiran. Tahap keempat, historiografi yang merupakan proses atau tahap penulisan (Kuntowijoyo 2013:80), sekaligus menjadi tahap paling akhir dalam penelitian sejarah. Historiografi memiliki tujuan untuk merekam, menginterpretasikan, dan menyajikan peristiwa masa lalu dengan cara yang objektif dan ilmiah. Penelitian dan penulisan sejarah yang dilakukan dengan cermat merupakan upaya untuk mendapatkan interpretasi yang lebih baik terkait perjalanan sejarah manusia dan pengaruhnya terhadap dunia saat ini.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Pendirian Awal Kantor Pos Kediri

Pembahasan mengenai pendirian awal Kantor Pos Kediri tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan cabang kantor pos sebagai layanan pengiriman masa kolonialisme Belanda. Pemahaman terhadap faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan pendirian kantor pos berguna untuk mengamati faktor-faktor eksternal dari lingkungan yang memengaruhi perusahaan atau layanan (Lena dan Ratnasari 2017:21).

Gubernur Jendral G.W. Baron van Imhoff pada masa pemerintahannya memainkan peran penting dalam pengembangan sistem jasa pengiriman di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia

Belanda mendirikan berbagai jenis infrastruktur administratif dan ekonomi untuk mengelola daerah kekuasaannya. Berdasarkan motivasi ekonomi, infrastruktur pendukung distribusi dikembangkan di wilayah Hindia Belanda melalui pembangunan jaringan jalan raya, jalur kereta api, dan pelabuhan (Kristian 2019:169). Dengan adanya infrastruktur pendukung distribusi, layanan jasa pengiriman dapat berjalan sesuai dengan perannya. Jasa pengiriman memiliki peran penting bagi pemerintah Hindia Belanda, seperti:

- a) komunikasi administratif,
- b) koneksi ekonomi,
- c) pertahanan dan keamanan, serta
- d) pemantauan ekonomi.

Pendirian kantor pos di Kediri tidak lepas dari pemilik kuasa, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Sebagaimana yang disampaikan Foucault, kuasa adalah milik pengendali ideologi/hegemoni (Dhona 2019:201). Alasan lain yang mendasari pendirian kantor pos dari sudut pandang masyarakat ialah kualitas jasa yang sangat berperan penting dalam langgengnya jasa pengiriman kantor pos pada masa pemerintah Hindia Belanda. Ada 10 faktor yang berpengaruh dalam kualitas jasa, yaitu keandalan, daya tanggap, bukti nyata, keamanan, kredibilitas, komunikasi, pemahaman, kompetensi, akses, dan kesopanan (Yudiana, Yulianthini, dan Telagawathi 2020:72).

Faktor geografis dan strategis Kediri sebagai pusat administratif regional menjadi pertimbangan utama dalam pendirian jasa kantor pos. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan mendasar. Pendirian kantor pos di

Kediri tidak hanya memperkuat pengelolaan administratif, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi. Pengaturan pendirian kantor pos awal di Kediri dapat ditemui pada dua sumber data tertulis masa kolonialisme Hindia Belanda, yaitu pada buku peraturan dan hukum *Verzameling van Wetten, Besluiten, Bepalingen, Kennisgaven, enz* dan surat kabar lama *Javasche Courant* keluaran 4 Desember 1830.



Gambar 2. Pengumuman di *Javasche Courant* 4 Desember 1830. Sumber: <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010501962:mpeg21>.

Dalam Surat Keputusan Pemerintahan Tinggi Hindia Belanda, 27 November 1830 dengan Nomor 10, diumumkan bahwa pendirian pos surat untuk kediaman/wilayah Madiun dan Kediri menjadi poin sentral dalam pengorganisasian sistem komunikasi kolonial pada periode tersebut. Keputusan ini mengandung sejumlah peraturan dan ketentuan yang diuraikan dengan cermat untuk memberikan pedoman operasional yang jelas seperti berikut.

1. Rute pengiriman pos surat dari dan ke Keresidenan Madiun dan Kediri ditetapkan melalui Rembang dan Surakarta.

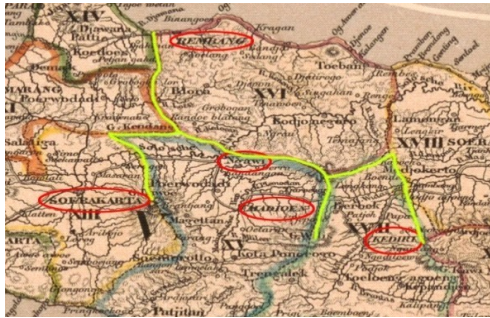
2. Jadwal pengiriman surat-surat:

- a. dari Surakarta dan Rembang ke daerah pos Madiun dan Kediri melalui Ngawi, dua jam setelah tiba di tempat tersebut, dari pos umum Samarang;
- b. dari Ngawi ke Kartoardjo (ibu kota Madiun), satu jam setelah pos Surakarta dan Rembang, keduanya tiba di Ngawi;
- c. dari Kartoardjo ke Kediri, dua jam setelah kedatangan Ngawi;
- d. dari Kediri lewat Kartoardjo ke Surakarta dan Rembang, setiap Kamis dan Minggu pagi pukul enam; dan
- e. dari Kartoardjo, dua jam setelah kedatangan surat dari Kediri ke Ngawi, dan dari sana satu jam setelah tiba ke Surakarta dan Rembang.

3. Penetapan ongkos kirim untuk beberapa surat pribadi

- a. dari Kediri hingga Kartoardjo: 20 *centen*;
- b. dari Kartoardjo sampai Ngawi: 8 *centen*;
- c. dari Ngawi hingga Rembang: 27 *centen*; dan
- d. dari Ngawi hingga Surakarta: 21 *centen*. (Anonim 1830 dan Tollens 1856:349).

Selain itu, imbalan yang setara akan diberikan dengan mempertimbangkan penyesuaian biaya sesuai dengan ketentuan ongkos kirim surat yang berlaku. Dalam keputusan tersebut, warga Surakarta, Rembang, Madiun, dan Kediri diimbau untuk memastikan pos surat beroperasi paling lambat pada 1 Januari. Keputusan ini diumumkan di Batavia pada 3 Desember 1830.



Gambar 3. Pemetaan jalur pos Keresidenan Madiun dan Kediri. Sumber: <https://hdl.loc.gov/loc.gmd/g8070.hl000026>.

Pada rincian di atas dapat diketahui beberapa poin penting. *Pertama*, rute pengiriman pos surat ditetapkan melalui Rembang dan Surakarta. Ini mencerminkan upaya untuk mengatur jalur komunikasi yang efektif antara Keresidenan Madiun dan Kediri dengan memanfaatkan jaringan transportasi yang tersedia (Tollens 1856:349).

Kedua, jadwal pengiriman surat diatur secara ketat dengan memberikan petunjuk waktu pengiriman dari berbagai lokasi secara spesifik, termasuk estimasi waktu perjalanan antarpos. Hal ini mencerminkan tata kelola yang terstruktur untuk memastikan kelancaran layanan pengiriman surat (Tollens 1856:349).

Ketiga, biaya pengiriman surat ditentukan berdasarkan rute dan jarak tempuhnya. Misalnya, biaya dari Kediri hingga Kartoardjo ditetapkan sebesar 20 sen, sementara biaya dari Kartoardjo sampai Ngawi adalah 8 *centen*/sen (Anonim 1830). Hal ini, mencerminkan penetapan tarif yang disesuaikan dengan jarak perjalanan antarlokasi, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan keuangan dalam layanan pos.



Gambar 4. Koin Kerajaan Belanda 1 sen tahun 1830. Sumber: <https://www.verzamelaarsmarkt.nl/munten/27671-46877-koninkrijksmunten-nederland-1-cent-1830-u.html>.

Keempat, uang yang digunakan dalam transaksi merupakan koin dalam *centen*/sen, atau tepatnya uang koin sen Kerajaan Belanda tahun 1830 (Anonim 2017). Padahal, uang koin yang sering digunakan pada periode 1800-1858 adalah koin *stuiver*. Kepopuleran uang koin *stuiver* tidak bisa lepas dari pengaruh Gubernur Jendral Herman Willem Daendels yang dikenal membangun Jalan Raya Pos (Alrosyid 2019:38). Meskipun demikian, sen dan *stuiver* memiliki nilainya tersendiri. *Stuiver* adalah pecahan mata uang yang digunakan dalam sistem uang Hindia Belanda. Adapun sen adalah pecahan mata uang yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan *stuiver*.

Kelima, pengumuman yang mengimbau warga Surakarta, Rembang, Madiun, dan Kediri untuk memastikan pos surat dapat dioperasikan paling lambat pada 1 Januari (Tollens 1856: 350). Ini mencerminkan urgensi dan tanggung jawab pihak lokal dalam menjalankan keputusan pemerintah, sekaligus memberikan batas waktu untuk persiapan dan implementasi pos surat.

Keenam, pengumuman pendirian pos untuk Madiun dan Kediri dilakukan di Batavia pada 3 Desember 1830. Lokasi dan tanggal pengumuman memberikan konteks historis dan administratif terkait dengan keputusan tersebut (Anonim 1830).

2. Jalan Pos Kediri (Postweg Kediri)

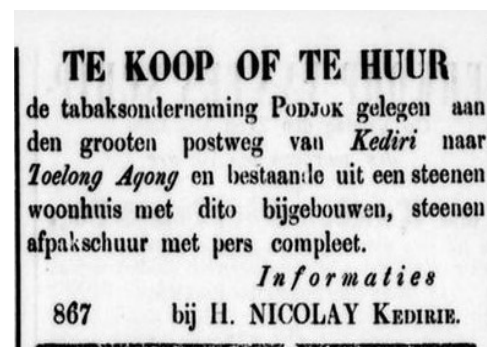
Pada masa kolonial Belanda, terdapat fenomena menarik terkait penamaan jalan. Bahasa Belanda memperkenalkan beberapa kata alternatif yang memberikan nuansa deskriptif mengenai jenis jalannya, contohnya:

- *weg*, merujuk pada jalan utama,
- *straat*, menggambarkan jalan yang berbatu-batu,
- *laan*, menunjukkan jalan yang indah dengan barisan pohon di sepanjangnya; dan
- *boulevard*, merujuk pada jalan raya bergengsi, yang umumnya lebar dan panjang (Raap 2015:167).

Pada periode kolonialisme Belanda, hanya sejumlah kecil jalan yang secara resmi ditetapkan dengan nama khusus. Mayoritas jalanan tidak mendapatkan penamaan khusus dan hanya mengadopsi nama wilayah di sekitarnya (Raap 2015:167). Contohnya, penamaan Groote Postweg atau Jalan Raya Pos. Groote Postweg merupakan jalan raya pos yang mencakup seluruh Pulau Jawa dan meskipun sebagian besar membentang di sepanjang pantai, di beberapa bagian melewati daerah pegunungan dan hutan di pedalaman untuk menjauhi rawa-rawa antara Batavia dan Cirebon (Nas dan Pratiwo 2002:707).

Berbeda dengan Groote Postweg yang sebagian besar mengikuti rute

pesisir utara, pada 1854 dimulai pembangunan *postweg* atau jalan pos melalui jalur selatan melalui Yogyakarta, Surakarta, dan Kediri. Dibandingkan dengan Groote Postweg yang berhasil selesai dalam waktu setahun, pembangunan *postweg* (jalan pos) di selatan memerlukan lebih dari dua puluh tahun untuk diselesaikan (Raap 2015:171). Adanya iklan perusahaan tembakau Podjok yang terletak di jalan pos utama Kediri pada 1886 menunjukkan bahwa pembangunan jalur *postweg* (jalan pos) sudah selesai dibangun sebelum adanya iklan ini (Anonim 1886a).



Gambar 4. Iklan perusahaan tembakau Podjok. Sumber: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011087188:mpeg21:a0025>.

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, gambar 4 menginformasikan bahwa: “Dijual atau disewakan perkebunan tembakau Podjok yang terletak di jalan pos utama Kediri ke Toelong Agong (Tulungagung) dan terdiri atas sebuah rumah tinggal berbahan batu beserta bangunan tambahan yang serupa, gudang tembakau berbahan batu dengan mesin pres lengkap.” Iklan perusahaan tembakau Podjok pada 1886 ini, tercatat dipublikasikan dua kali pada surat kabar *Soerabaijasch Handelsblad*.

Selain itu, iklan perusahaan tembakau Podjok dipublikasikan dalam waktu yang berjangka, yaitu pada 1 Mei 1886 (Anonim 1886b) dan 22 Mei 1886 (Anonim 1886a).

Meskipun iklan perusahaan tembakau Podjok pada 1886 tidak secara langsung terhubung dengan pembangunan *postweg* (jalan pos) di jalur selatan yang dimulai pada 1854, keduanya mencerminkan konteks sejarah yang sama di Kediri pada periode waktu lebih dari 20 tahun setelah pembangunan *postweg* (jalan pos) di jalur selatan. Iklan tembakau dan pembangunan jalan pos di jalur selatan mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi Kediri pada masa kolonial, ketika keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan konektivitas regional. Dalam ranah ekonomi makro, keberadaan iklan memiliki peran yang sangat signifikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Kesuma 2012:60).

Keberlanjutan pembangunan jalan pos yang memakan waktu lebih dari 20 tahun di jalur selatan dapat dilihat dari adanya lelang yang menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan konektivitas dan infrastruktur transportasi di Kediri pada 1887. Pengumuman lelang perbaikan jalan untuk jalur *postweg* Kediri dibuat oleh Kepala Utama Waterstaats-Ambtenaar yang bertugas pertama kali di Kediri.

Pada 30 April 1887, Kepala Utama Waterstaats-Ambtenaar yang bertugas pertama kali di Kediri mengeluarkan pengumuman resmi terkait lelang umum yang akan diselenggarakan pada Rabu, 1 Juni 1887, pukul 09.00 di

kantornya. Lelang ini dimaksudkan untuk pelaksanaan sejumlah pekerjaan perbaikan berat pada jembatan-jembatan tertentu di wilayah tersebut, yang mencakup:

- a pekerjaan perbaikan berat pada jembatan Tjermé No.312 dan Pakoenden III No.317, yang semuanya terletak di jalan pos dari Blitar ke Kediri, dengan nilai tawaran maksimum sebesar f4461.
- b pekerjaan perbaikan berat pada jembatan Grompol II dan Djantie, yang semuanya terletak di jalan pos dari Kediri ke Surabaya, dengan nilai tawaran maksimum f2193.
- c pekerjaan perbaikan berat pada jembatan Soembersarie No.215, Plossoredjo No.218, dan Goejangan No.221, yang semuanya terletak di jalan pos dari Kediri ke Madiun, dengan nilai tawaran maksimum f3917 (Anonim 1887a).

Apabila lelang tersebut tidak berhasil, lelang akan segera diadakan untuk pengadaan bahan material yang diperlukan untuk setiap paket, termasuk yang belum tersedia dalam stok pemerintah. Ketentuan dan syarat-syarat lelang telah tersedia sejak hari pengumuman ini, kecuali pada hari Minggu dan hari libur kantor. Semua informasi yang diperlukan dapat diperoleh di tempat tersebut. Pengumuman lelang umum diitandatangani oleh Kepala Utama Waterstaats-Ambtenaar yang Bertugas Pertama, J. J. Beekveld, sebagai tanda keabsahan dan otoritas pada tanggal yang disebutkan (Anonim 1887a). Perlu dicatat bahwa pengumuman lelang umum untuk proyek perbaikan telah mendapat perhatian yang serius

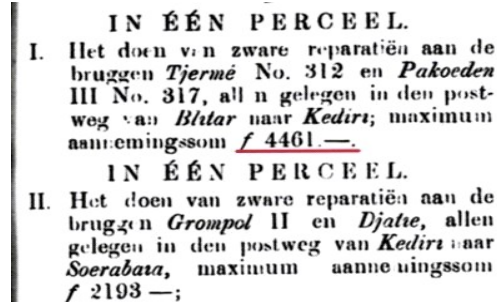
melalui publikasi yang berulang. Total pengumuman yang telah dimuat sebanyak 11 kali dan ditempatkan di tiga jenis surat kabar yang berbeda, masing-masing 2 kali di *Soerabaijasch Handelsblad*, 3 kali di *De Locomotief*, dan 6 kali di *De Nieuwe Vorstenlanden*.¹ Selain itu, surat kabar lelang umum tentang proyek perbaikan jembatan dipublikasikan satu bulan penuh secara berkala. Informasi mengenai lelang ditempatkan pada halaman-halaman surat kabar yang memiliki jangkauan dan pembaca yang bervariasi.

Pemberitaan lelang umum untuk proyek perbaikan di ketiga surat kabar memperlihatkan persamaan bulan dan tahun publikasi. Akan tetapi, terdapat perbedaan kecil antara pemberitaan di surat kabar *De Nieuwe Vorstenlanden* dan surat kabar *Soerabaijasch Handelsblad* (Anonim 1887d) dan *De Locomotief* (Anonim 1887d) yakni mengenai harga lelang untuk perbaikan paket pertama seperti yang ditunjukkan di gambar 5 dan 6.

¹ Surat kabar *Soerabaijasch Handelsblad* mempublikasikan berita lelang umum untuk proyek perbaikan, terbit pada 3 dan 4 Mei 1887 (Anonim 1887a dan Anonim 1887b). Surat kabar *De Locomotief* mempublikasikan kabar lelang umum untuk proyek perbaikan, terbit pada 5 dan 6 Mei (Anonim 1887a dan Anonim 1887b), dan 9 Mei 1887 (Anonim 1887c). Surat kabar *De Nieuwe Vorstenlanden* mempublikasikan kabar lelang umum untuk proyek perbaikan, terbit pada 4, 6, 9, 13, 23, dan 25 Mei 1887 (Anonim 1887a -1887f).



Gambar 5. Harga lelang perbaikan paket pertama di surat kabar *De Nieuwe Vorstenlanden*. Sumber: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000527052:mpeg21:a00013>.



Gambar 6. Harga lelang perbaikan paket pertama di surat kabar *Soerabaijasch Handelsblad* dan *De Locomotief*. Sumber: <https://resolver.kb.nl/solve?urn=ddd:010337367:mpeg21:a0036>; January 23, 2024; Anonim 1887d, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011087485:mpeg21:a0016>; January 10, 2024).

Harga perbaikan paket pertama yang dimuat di surat kabar *De Nieuwe Vorstenlanden* sama dengan harga perbaikan paket kedua dengan besar nominal f2193. Berbeda dengan harga yang ditawarkan pada surat kabar *Soerabaijasch Handelsblad* (Anonim 1887d), dan surat kabar *De Locomotief* (Anonim 1887d), yang memperlihatkan bahwa harga perbaikan paket pertama (f4461) lebih mahal dari harga perbaikan paket kedua (f2193). Dilihat dari perincian lelang umum di atas, dapat diketahui beberapa poin penting,

di antaranya:

- a. informasi waktu pengumuman lelang umum;
- b. tujuan utama proyek;
- c. informasi pembagian proyek;
- d. perbedaan harga lelang;
- e. langkah antisipatif;
- f. ketentuan dan syarat-syarat lelang;
- g. tanda tangan resmi;
- h. publikasi berulang; dan
- i. penggunaan uang gulden.

Pada 1889, *postweg* Kediri menjadi bagian dari perbatasan garis khayal District Jombang. Dalam buku lama berjudul “*Kumpulan Peraturan, Ketentuan, dan Ketentuan Kepolisian untuk Residentie Surabaya*” di District Mojokerto terdapat garis batas yang mengelilingi empat bidang tanah, dengan perincian sebagai berikut.

1. Di sebelah utara jalan pos utama menuju Kediri, terdapat garis lebar 90 meter yang membentang dari pasar Djombang hingga pos 54 pada jalan tersebut.
2. Di sebelah selatan jalan utama, terdapat garis selebar 185 meter yang membentang dari Kali Djombang hingga pos 54, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Garis khayal ini juga melibatkan jalan timur dan barat Djombang hingga ibu kota Kali Woengoe. Keduanya memiliki lebar 90 meter dan membentang dari jalan pos utama Kediri sampai Kali Van Hengel (Albrecht dan Rusche 1889:97).

Dengan adanya garis batas ini, dapat diidentifikasi dengan jelas wilayah yang termasuk dalam District Mojokerto pada periode tersebut. Garis batas khayal teritorial ini memiliki peran penting dalam pembagian

administratif dan pengaturan tanah pada masa itu. Garis ini pun memastikan batas yang jelas antara berbagai area yang berada di bawah administrasi District Mojokerto (Albrecht dan Rusche 1889:97). Hal ini menandakan *Postweg* Kediri tidak hanya menjadi jalur perekonomian yang vital, tetapi juga menjadi garis administratif politik yang memengaruhi pembagian administratif dan yurisdiksi di wilayah batas Residentie Kediri.

Dengan melihat foto gapura lama *Postweg* Kediri yang terletak di Jalan Daerah Minggiran pada 1907, kita dapat memperoleh gambaran visual yang mendukung pemahaman kita tentang gambaran jalur pos di Residentie Kediri (lihat gambar 7). Foto gapura lama Minggiran menjadi jendela waktu yang menghubungkan kita secara langsung dengan penampakan pada 1907. Hal ini, menunjukkan bagaimana *Postweg* Kediri telah menjadi elemen penting dalam struktur jalan dan transportasi pada periode tersebut.



Gambar 7. Kediri Oude Poort Weg n. Minggiran. Sumber: Leiden University Libraries 1907, <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/724934>.

Menurut Nieuwenhuys dalam Raap (2015:171), foto gapura lama tersebut diabadikan ketika perusahaan importir mobil Verwey & Lugard melakukan perjalanan uji coba keandalan jalan trans-Jawa, dengan melakukan kunjungan ke Kediri dalam bentuk konvoi mobil. Terlihat sebuah mobil Spijker dari konvoi yang melaju dengan kecepatan penuh. Mobil tersebut melintasi gapura kota di jalan pos, dari Kediri menuju utara ke Minggiran. Gaya arsitektur pada periode 1860-1890 tercermin dalam struktur gapura yang memiliki ornamen lisplang horizontal pada bagian ketiak gapura. Gapura yang berdiri di Jalan Mayor Bismo itu berfungsi sebagai tanda batas Kota Kediri di sebelah utara. Saat ini gapura tersebut telah mengalami perubahan bentuk akibat pelebaran jalan (Raap 2015:171).

3. Masuknya Teknologi Telegraf dan Perannya

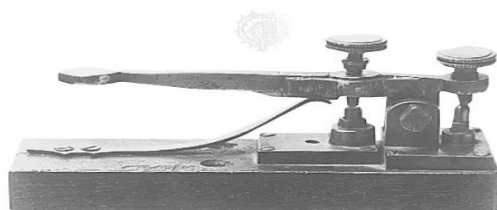
Perkembangan teknologi telegraf di Kantor Pos Kediri menjadi salah satu tonggak penting dalam mempercepat pertukaran informasi dan komunikasi di Residentie Kediri. Telegraf merupakan alat yang memungkinkan pengiriman informasi berupa kode morse melalui suatu kawat dari pengirim ke penerima (Kadarudin dan Ibda 2020:5). Penerima kemudian akan melakukan deskripsi pada kode morse tersebut untuk menginterpretasikan pesan yang dikirim. Pesan yang dikirim melalui telegraf sering kali dikenal sebagai telegram atau surat kawat. Telegraf merupakan perangkat komunikasi yang memiliki dampak besar dalam sejarah evolusi sistem pengiriman pesan (Lutfia

dan Sachari 2012:1).

Kediri, sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam jaringan telegraf, mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka mengelola dan menyampaikan pesan. Masuknya teknologi telegraf ke wilayah Kediri pada masa kolonial berperan signifikan dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi di berbagai sektor, tak terkecuali industri pabrik gula. Kediri merupakan salah satu sentral industri pabrik gula terpenting pada masa kolonial di Hindia Belanda. Selain disebut “Kota Tahu” karena industri tahunya, Kediri dikenal juga dengan sebutan “lumbung gula” (Nazri 2024:3). Pada masa kolonial, banyak pabrik gula di wilayah Kediri seperti: PG Meritjan, PG Pesantren, PG Ngadiredjo, PG Kawarasan, PG Purwoasri, PG Tegowangi, dan PG Minggiran. Pabrik gula tersebut ada yang dikelola perusahaan-perusahaan besar asal Belanda, NV Handels Vereeniging Amsterdam (HVA), misalnya Pabrik Gula Ngadiredjo yang memainkan peran penting dalam jaringan produksi dan distribusi gula di kawasan Keresidenan Kediri (Nazri 2024:3). Teknologi telegraf sangat membantu dalam efisiensi bisnis, serta perluasan jaringan sosial dan mobilitas. Pada 1856, pendirian sambungan telegraf pertama di Hindia Belanda menciptakan tonggak sejarah yang mempercepat pertukaran informasi. Pesan perdana dikirim pada 23 Oktober 1856 yang menghubungkan Batavia (tepatnya di Weltevreden dan Buitenzorg (Bogor) (Anonim 1867:332). Meskipun awalnya jalur ini diperuntukkan bagi kepentingan

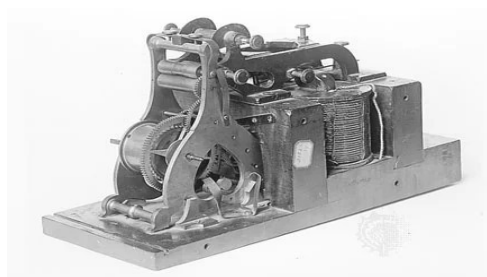
pemerintah, namun seiring waktu, sambungan telegraf juga dibangun antara Batavia dan Surabaya dengan cabang menuju Ambarawa pada 1857. Pada 10 Mei 1856, penggunaan telegraf dibuka untuk masyarakat umum. Tiga tahun berikutnya masyarakat dapat menyaksikan penyelesaian jaringan telegraf di Pulau Jawa.

Pada akhir 1859, panjang jalur telegraf mencapai 2696 kilometer dengan jumlah kantor meningkat menjadi 28. Kantor-kantor tersebut tersebar di berbagai kota seperti Anyer, Batavia, dan Weltevreden (Hermawan dan Abrianto 2020:4). Selain itu, ada pula kantor yang berlokasi di Buitenzorg, Bandung, Cirebon, Semarang, Ambarawa, Surabaya, Banyuwangi, Banyumas, Magelang, Surakarta, Kediri, Cilacap, Besuki, Tegal, Rembang, Yogyakarta, Pasuruan, Purwakarta, Pekalongan, Madiun, Probolinggo, Purworejo, Cianjur, Serang, dan Pati (Anonim 1867:332).



Gambar 8. Alat pemancar key-type morse telegraf dari tahun 1840-an.

Sumber: <https://www.britannica.com/technology/telegraph>.



Gambar 9. Alat pencatat/register morse telegraf dari 1840-an.

Sumber: <https://www.britannica.com/technology/telegraph>.

Pada 1860, jumlah kantor bertambah lagi dengan pendirian kantor baru di Indramayu. Setelah itu, pertambahan terus terjadi, berturut-turut di Salatiga dan Mojokerto (1865); Sabang dan Ciamis (1870); Gresik, Tuban, Bojonegoro, Ngawi dan Situbondo (1871); Meester-Cornelis/Jatinegara, Kudus, dan Klaten (1873); Blitar, Malang, Lumajang, dan Bondowoso (1874); Sumedang, Kendal, dan Boyolali (1875); Jepara, Sidoarjo, dan Tulungagung (1877); Sukabumi (1878); Banyumas, Demak, Jember, Juwana, Karanganyar, Kraksaan, Pacitan, Ponorogo, Temanggung, dan Wonosobo (1878); Bangil, Garut, dan Karawang (1881); Kota-Radja dan Oleh-leh (1882); Wlingi dan Anyer Baru (1883).

Pada 1884, kantor di daerah Anyer terpaksa ditutup akibat kerusakan kota akibat letusan Gunung Krakatau. Demikian pula dengan kantor di Kalianda yang ditutup pada tahun yang sama. Sementara itu, di daerah Lengkong (Surabaya) sebuah kantor telegraf sementara didirikan. Hanya ada seorang pegawai yang ditugaskan saat air sungai naik (Anonim 1867:332). Perkembangan ini memberikan

kontribusi besar terhadap transformasi komunikasi di Hindia Belanda pada periode tersebut dan membawa manfaat signifikan bagi administrasi, ekonomi, dan interaksi sosial di Hindia Belanda.

Peraturan mengenai layanan telegraf di Hindia Belanda dijelaskan secara rinci dalam pasal 1 dari Keputusan Gubernur, 28 Januari 1880, Nomor 2 (*Staatsblad 1880 Nomor 26*), yang kemudian mengalami perubahan melalui pasal 1 Keputusan Gubernur 13 Agustus 1882, Nomor 4 (*Staatsblad 1880 Nomor 208*), serta di *Staatsblad 1883 Nomor 164* (Anonim 1885:276). Dalam konteks lalu lintas domestik, biaya pengiriman telegram antara dua kantor dengan jarak langsung 75 kilometer atau kurang akan dikenakan biaya tetap sebesar 20 sen, ditambah 4 sen per kata. Untuk jarak lebih dari 75 hingga 335 kilometer, biaya tetapnya menjadi 40 sen, ditambah 8 sen per kata. Sementara untuk jarak yang lebih jauh, biaya tetapnya adalah 60 sen, ditambah 12 sen per kata. Tarif yang telah disusun berdasarkan prinsip ini, bersama dengan biaya telegram ke luar negeri, dapat ditemukan dalam lampiran NN dan OO (Anonim 1885:277).

Sejak 1 Januari 1883, kantor telegraf dari layanan Kereta Api Negara telah dibuka untuk umum, suatu langkah yang dianggap sangat penting karena hampir menggandakan peluang untuk mengirimkan telegram (Anonim 1885:274). Di tahun yang sama, terdapat beberapa perubahan dalam jaringan telegraf di Hindia Belanda. Jalur telegraf antara Sidoarjo, Mojokerto, Kertosono, dan Kediri, serta antara Kertosono dan Madiun, dipindahkan

sepanjang jalur kereta api. Sebagai konsekuensinya, jalur telegraf antara Madiun dan Kediri dihilangkan. Selain itu, pembangunan jalur telegraf baru dilakukan antara Cilegon dan Anyer Baru untuk menggantikan jalur yang rusak akibat letusan Gunung Krakatau antara Cilegon dan Anyer (Anonim 1885:275). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan telegraf di wilayah Jawa Timur.

Tarif khusus sebesar 20 sen per telegram, ditambah 4 sen per kata, diberlakukan untuk telegram yang berasal dari dan ditujukan untuk stasiun atau pemberhentian kereta api negara. Sistem tarif ini berlaku eksklusif untuk layanan kereta api yang bertanggung jawab mengirimkan telegram dari tempat asal ke tujuan (Anonim 1885:276). Dengan aturan ini, layanan telegraf kereta api dapat memberikan tarif yang lebih terjangkau untuk mengirimkan pesan-pesan penting atau komunikasi resmi antarstasiun atau pemberhentian. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dan penggunaan telegraf dalam lingkup kereta api negara.

Dalam konteks penanganan bencana, perkembangan teknologi komunikasi, seperti telegraf pada masa pemerintahan Hindia Belanda menjadi krusial. Saat terjadi bencana, masyarakat memerlukan informasi yang akurat dan cepat. Oleh karena itu, persoalan mengenai informasi, komunikasi, dan koordinasi menjadi sangat penting untuk menangani korban bencana serta mencegah terjadinya risiko (Putri dan Hamzah 2021:72).

Seperti yang terjadi pada 25 Maret 1894, Resident Kediri mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzorg untuk melaporkan tentang banjir yang terjadi karena meluapnya Sungai Brantas, khususnya di wilayah Poerwoasri (Purwoasri). Banjir tersebut menyebabkan hanyutnya Jembatan Ngoedjang (Ngujang) di Afdeeling Ngrowo. Saat itu, telegraf digunakan untuk memberikan informasi tentang dampak tingginya permukaan air Sungai Brantas di berbagai desa dan sawah (Istieni 2018:37). Surat telegram Resident Kediri kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1894 adalah sebagai berikut.

Sehubungan dengan sembilan telegram yang diterima kemarin, dengan hormat saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa berdasarkan laporan dari Pengendali Pare, dampak tingginya permukaan air di Sungai Brantas, sejumlah desa dan sawah tergenang banjir sehari sebelumnya. Di Poerwoasrie, air meluap melewati tanggul menyebabkan beberapa kerusakan, meskipun tidak sampai terjadi kebocoran. Meskipun kerusakan pada desa dan sawah belum dapat dihitung dengan pasti, kemungkinan hanya akan menimbulkan dampak kecil.

Hingga saat ini, saya belum menerima laporan adanya kerusakan dari Afdeeling lain, kecuali terkait jembatan Ngoedjang di Afdeeling Ngrowo yang rusak sebagaimana telah saya laporkan melalui telegram.

Mengingat air sungai memiliki bau

yang sangat tidak sedap, sangat berlumpur, dan berwarna gelap hingga hitam, saya telah memerintahkan Asisten Resident Blitar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang penyebabnya. Saya juga menerima laporan telegraf kemarin malam, menunjukkan bahwa tidak ada pusaran lumpur yang berasal dari Pasoeroean (Pasuruan), lumpur berat diduga berasal dari Danau Brantas di sekitar Gunung Keloet (Kelud).



Gambar 10. Telegram tentang banjir di Kediri pada surat kabar 14 Maret 1913. Sumber: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010167338:mpeg21:a0043>.

Peran telegraf dalam penyebaran informasi bencana banjir di Kediri dapat dilihat pada telegram yang dimuat di surat kabar pada 14 Maret 1913. Telegram tersebut berisi informasi mengenai lalu lintas yang diblokir di sepanjang jalan pos Djombang (Jombang) hingga Kediri yang tersendat akibat banjir (Anonim 1913). Menurut Haddow dan Haddow dalam Tamitiadin, Dewi, dan Adila (2019:207), *media partnership* merupakan salah satu dari empat landasan pokok dalam komunikasi bencana. Media seperti surat kabar memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menyampaikan informasi telegram secara akurat kepada masyarakat.

Dalam konteks sosial ekonomi lain, peran telegraf dapat ditemui pada pengiriman pesan telegram untuk mutasi pekerjaan. Mutasi pekerjaan

dapat dipahami sebagai fenomena yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga terkait erat dengan aspek ekonomi dalam konteks perkembangan karier dan kehidupan seseorang. Pada 30 Desember 1919, layanan telegram swasta India dari Nieuws v. d. Dag v.N.I., menjelaskan adanya pengumuman mutasi. Pada 30 Desember 1919. Konsultan/penasihat kimia di pabrik minyak Insulinde, Bapak Wellenstein di Kediri, akan mengundurkan diri pada satu Januari. Penggantinya adalah Dokter Kluyver dari Buitenzorg (Anonim 1919). Pemberitahuan mutasi pekerjaan pada 1919 melalui layanan telegram swasta India menunjukkan bagaimana telegraf berperan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan aspek pekerjaan dan karier.

Meskipun teknologi telepon telah ada pada 1881, kepemilikan jaringan telepon masih di bawah perusahaan swasta dengan izin dari pemerintah Hindia Belanda dan hanya tersedia di kota-kota besar, seperti: Jakarta, Semarang, Surabaya, Gambir dan Tanjung Priok (Ratnasari 2013:287). Pada 1915, pemerintah kolonial membagi wilayah pengelolaan telepon menjadi tujuh daerah sementara dengan tujuan untuk memfasilitasi pengelolaan telepon yang lebih baik. Pada 1930, Kantor Pos Kediri belum mengadopsi teknologi telepon dan masih menggunakan nama *post- en telegraaf kantoer* (Leiden University Libraries 1930). Daerah-daerah tersebut mencakup Surabaya, Madiun, Kediri, Pasuruan, Besuki, Madura, Bali, dan Lombok, yang dikelompokkan ke dalam distrik ketiga dengan pusat

pengelolaannya terletak di Surabaya. Awalnya, jaringan telepon di Surabaya difungsikan hanya sebagai alat komunikasi pembantu layanan pos dan telegraf, dengan penempatannya di daerah yang belum memiliki kantor pos (Ratnasari 2013:290).

Pada 1930, Kantor Pos Kediri menuju puncak akhir dalam penggunaan teknologi telegraf sebagai sistem komunikasi utama. Perkembangan tersebut menandai tonggak bersejarah dalam upaya modernisasi layanan komunikasi di wilayah Kediri. Telegraf dengan keunggulannya dalam mentransmisikan pesan secara cepat telah menjadi tulang punggung komunikasi jarak jauh dan segera diterima masyarakat setempat. Pencapaian ini kemudian membentuk dasar yang kokoh dan mempersiapkan jalan untuk perkembangan teknologi selanjutnya. Tak lama setelah membawa Kediri ke era baru komunikasi modern, pada 1932, teknologi telepon pun diperkenalkan di kantor pos berbarengan dengan penetapan Dinas Pos, Telegraf, dan Telepon sebagai perusahaan nasional pada 1 Januari 1932 (Nijhoff 1939:1538).

D. SIMPULAN

Pendirian awal Kantor Pos Kediri tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi pembentukan cabang kantor pos tersebut. Faktor-faktor ini memainkan peran krusial dalam pengelolaan administratif dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi. Komunikasi administratif, koneksi ekonomi, dan

aspek pertahanan keamanan menjadi fokus utama dalam pengoperasian Kantor Pos Kediri.

Pembangunan Jalan Pos Kediri di jalur selatan melalui Yogyakarta, Surakarta, dan Kediri menjadi bagian esensial dalam pengembangan konektivitas transportasi di Pulau Jawa. Proyek pembangunan ini membutuhkan waktu yang signifikan dan melibatkan proses lelang serta perencanaan infrastruktur yang matang. Pembangunan ini pun mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi Kediri pada masa kolonial, yang keberlanjutan infrastrukturnya menjadi kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional.

Perkembangan teknologi telegraf di Kantor Pos Kediri memberikan dampak besar dalam mempercepat pertukaran informasi dan komunikasi di wilayah tersebut. Telegraf menjadi sarana yang sangat vital dalam berbagai aspek, mulai dari komunikasi administratif, penanganan bencana, hingga sosial ekonomi seperti proses mutasi pekerjaan. Dalam konteks industri gula, keberadaan telegraf berperan penting dalam meningkatkan efisiensi manajerial dan distribusi industri gula kolonial. Kediri dengan pabrik gula di bawah HVA menjadi contoh integrasi teknologi komunikasi dalam memperkuat posisi ekonomi regional sehingga Kediri dikenal sebagai “Kota Tahu” sekaligus “lumbung gula” dalam sistem ekonomi kolonial. Meskipun telepon juga telah ada pada masa tersebut, telegraf tetap menjadi tulang punggung utama dalam sistem komunikasi dan mendukung modernisasi layanan komunikasi di

Kediri. Dengan demikian, eksistensi Kantor Pos Kediri sepanjang 1830-1930 memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya infrastruktur komunikasi dalam mendukung berbagai kegiatan administratif, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut selama periode kolonial Hindia Belanda.

DAFTAR SUMBER

- Albrecht dan Rusche. 1889. *Verzameling van Reglementen, Keuren en Politiebepalingen voor De Residentie Soerabaja*. Batavia.
- Alrosyid, S. 2019. *Perkembangan Uang dalam Sejarah Indonesia*. Edisi 1. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Anonim. 1830. “Advertentien.” *Javasche Courant*, Desember, 4.
- Anonim. 1867. *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie*. Batavia.
- Anonim. 1885. *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie*. Batavia.
- Anonim. 1886a. “Te Koop of te Huur.” *Soerabaijasch Handelsblad*, Mei, 22.
- Anonim. 1886b. “Te Koop of te Huur.” *Soerabaijasch Handelsblad*, Mei, 1.
- Anonim. 1887a. “De Locomotief: Samarangsch Handels- En Advertentie-Blad.” *Www.Delpher.Nl*, Mei, 5.
- Anonim. 1887b. “De Locomotief: Samarangsch Handels- En Advertentie-Blad.”

- Www.Delpher.Nl*, Mei, 6.
- Anonim. 1887c. "De Locomotief: Samarangsche Handels- En Advertentie-Blad." *Www.Delpher.Nl*, Mei, 9.
- Anonim. 1887d. "De Eerstaanwezend Waterstaats- Ambtenaar te Kediri, Maakt Bekend, dat op Woensdag den Eersten Juni 1887." *Soerabaijasch Handelsblad*, Mei, 3.
- Anonim. 1887e. "De Eerstaanwezend Waterstaats- Ambtenaar te Kediri, Maakt Bekend, dat op Woensdag den Eersten Juni 1887." *Soerabaijasch Handelsblad*, Mei, 4.
- Anonim. 1887f. "De Eerstaanwezend Waterstaats- Ambtenaar te Kediri, Maakt Bekend, dat op Woensdag den Eersten Juni 1887." *De Nieuwe Vorstenlanden*, Mei, 4.
- Anonim. 1887g. "De Eerstaanwezend Waterstaats- Ambtenaar te Kediri, Maakt Bekend, dat op Woensdag den Eersten Juni 1887." *De Nieuwe Vorstenlanden*, Mei, 6.
- Anonim. 1887h. "De Eerstaanwezend Waterstaats- Ambtenaar te Kediri, Maakt Bekend, dat op Woensdag den Eersten Juni 1887." *De Nieuwe Vorstenlanden*, Mei, 9.
- Anonim. 1887i. "De Eerstaanwezend Waterstaats- Ambtenaar te Kediri, Maakt Bekend, dat op Woensdag den Eersten Juni 1887." *De Nieuwe Vorstenlanden*, Mei, 13.
- Anonim. 1887j. "De Eerstaanwezend Waterstaats- Ambtenaar te Kediri, Maakt Bekend, dat op Woensdag den Eersten Juni 1887." *De Nieuwe Vorstenlanden*, Mei, 23.
- Anonim. 1887k. "De Eerstaanwezend Waterstaats- Ambtenaar te Kediri, Maakt Bekend, dat op Woensdag den Eersten Juni 1887." *De Nieuwe Vorstenlanden*, Mei, 25.
- Anonim. 1888. *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie*. Batavia.
- Anonim. 1913. "Verkeer Gestremd." *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch- Indie*, Maret, 14.
- Anonim. 1919. "Mutatie." *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie*, Desember, 31.
- Anonim. 2017. "Koninkrijksmunten Nederland 1 Cent 1830." Diunduh 26 Januari, 2024 (<https://www.verzamelaarsmarkt.nl/munten/27671-46877-koninkrijksmunten-nederland-1-cent-1830-u.html>).
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2018. *Inventaris Arsip Tekstual Post, Telegraaf, En Telefoondienst (1817-1950)*.
- Dhona, Holy Rafika. 2019. "Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi." *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication* 9(2):189-208.
- Hermawan, Iwan, dan Octaviadi Abrianto. 2020. "Pola Tata Ruang Weltevreden dan Fungsi Ruang Kota." *Jurnal Panalungtik* 3:1-13.
- Heryati. 2017. *Pengantar Ilmu Sejarah*.

- Palembang: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah.
- Istieni, Nofi. 2018. "Banjir di Tulungagung Tahun 1955-1986." *Jurnal Avatar* 6(2):36-45.
- Kadarudin dan H. Ibda. 2020. *Cerdas Bermedia Sosial dari Kacamata Hukum Dr. Kadarudin*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Kesuma, Teuku Meldi. 2012. "Prinsip dan Kriteria Periklanan dari Perspektif Islam." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1(1):59-82.
- Kristian, Yuli. 2019. *Politik Ekonomi Belanda terhadap Lampung pada Tahun 1800-1942*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. 1st ed. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hoofdbestuur van den post-,telegraaf- en telefoondienst,1924. *Post-En Telegraaf gids voor Ned. Indie*. Weltevreden: Landsdrukkerij.
- Leiden University Libraries. 1907. "Poort over de Weg Tussen Kediri En Minggiran." *Digitalcollections. UniversiteitLeiden.Nl*. Diunduh 16 November 2023 (<https://digitalcollections.universiteitLeiden.nl/view/item/724943>).
- Leiden University Libraries. 1930. "Post- En Telegraaf Kantoor Te Kediri." *Digitalcollections. UniversiteitLeiden.Nl*. Diunduh 13 November 2023 (<https://digitalcollections.universiteitLeiden.nl/view/item/804275>).
- Lena, Sonty dan Pertiwi Ratnasari. 2017. "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pengiriman Barang dan Surat di PT. Pos Indonesia MPC Bandung." *Jurnal Komputer Bisnis* 10(2).
- Lutfia, Annisa dan Agus Sachari. 2012. "Simulasi Telegraf sebagai Sarana Interaktif pada Museum Pos Indonesia." *Product Design* 1(1).
- McGillem, Clare D. 2024. "Telegraph." *Encyclopedia Britannica*.
- Nadia, Wardatul dan Siti Heidi Karmela. 2020. "Pengantar Pos Indonesia Cabang Jambi 1965-1995." *Jurnal Istoria* 4(1):61-70.
- Nas, Peter J. M. dan Pratiwo. 2002. "Java and De Groote Postweg, La Grande Route, the Great Mail Road, Jalan Raya Pos." *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde* 158(4):707-25.
- Nawiyanto, Handinoto, Rita Krisdiana, Sofwan Kurnia, Wihujeng Rengganis, Aryni Ayu Widiyawati, dan Allan Akbar. 2022. *Membangun Kemakmuran di Pedalaman Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri*. disunting oleh G. Asnan. Kediri.
- Nazri, Ahmad Iqbal. 2024. "Dinamika Pabrik Gula Ngadiredjo di Kabupaten Kediri pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1930-1942." *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 15(3):1-9.

- Nijhoff, Martinus. 1939. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*-Gravenhage.
- Nisrina, Shela Rona. 2018. "Strategi Promosi pada PT. Pos Indonesia Cabang Kediri dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Ekspedisi ditinjau dari Syari'ah Marketing." Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAIN Kediri, Kota Kediri.
- Putri, Citra Eka dan Radja Erland Hamzah. 2021. "Aplikasi Peduli Lindungi Mitigasi Bencana Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Pustaka Komunikasi* 4(1):66-78.
- Raap, Oliver Johannes. 2015. *Kota di Djawa Tempo Doeloe*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ratnasari, Eka Ayu. 2013. "Jaringan Telepon Kota Surabaya Tahun 1906-1941." *E-Journal Pendidikan Sejarah* 1(2):286-93.
- Serné, S. H. dan W. F. Versteeg. 1869. "Algemeene Kaart van Nederlandsch Indië." *Library of Congress Geography and Map Division Washington*. Diunduh 2 Desember, 2023 (<https://hdl.loc.gov/loc/gmd/g8070.hl000026>).
- Siagian, Ade Onny. 2021. *Manajemen Perkantoran*. Banyumas: Omera Pustaka.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Tamitiadin, Dian, Wayan Weda Asmara Dewi, dan Isma Adila. 2019. "Inovasi Model Mitigasi Bencana Non Struktural Berbasis Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama." *Conference On Communication and News Media Studies* 1:204-14.
- Tollens, Mr. L. J. A. 1856. *Verzameling van Wetten, Besluiten, Bepalingen, Kennisgaven*, Enz. Batavia.
- Widodo, Dukut Imam. 2015. *Kediri Tempo Doeloe*. Surabaya: Dukut Publishing.
- Yudiana, I Made, Ni NYoman Yulianthini, dan Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi. 2020. "Faktor-Faktor yang dipertimbangkan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang pada JNE KP Negara." *Jurnal Manajemen Indonesia* 8(2):70-81.
- Yuhida, Suisiana. 2011. "Peranan Pos Indonesia (Studi Tentang Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa Bagi Masyarakat)." Universitas Sebelas Maret.